

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Waça karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut di atas Rencana Kerja Perubahan (RENJA) sementara ini disusun dengan masih mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kubutambahan Tahun 2017 – 2022.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Kecamatan Kubutambahan ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022.

Kubutambahan, 24 Agustus 2022

Camat Kubutambahan



Drs. Made Suvasa, M.Si

Nip. 19650207 199702 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 050/485/HK/2022
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
2.1 Landasan Hukum	2
3.1 Maksud dan Tujuan	4
4.1 Sistematika Penulisan	4
BAB II	5
BAB III	12
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	12
BAB IV	20
PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan 2022 Kecamatan Kubutambahan yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Kubutambahan, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan SKPD yang dicapai pada masa satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Tahun 2022 Kecamatan Kubutambahan dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumberdaya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Tahun 2022 Kecamatan Kubutambahan memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 2022 Kecamatan Kubutambahan serta kerangka pendanaan daerah, Renja 2022 SKPD Kecamatan Kubutambahan secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda SKPD dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra SKPD) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindaklanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kubutambahan tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Tahun 2017-2022. Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2022, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan II tahun berkenaan sebelumnya.

2.1 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Tahun 2022 Kecamatan Kubutambahan adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
 - a) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - e) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - g) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - j) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang Daerah dan rencana kerja Pemerintahan

- l) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- m) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng

3.1 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Kubutambahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2022 dan berpedoman pada Draft Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kubutambahan Tahun 2017-2022. Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Kubutambahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Kecamatan Kubutambahan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kubutambahan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Kubutambahan tahun 2022;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022.

4.1 Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

2.1. Landasan Hukum

3.1. Maksud dan Tujuan

4.1. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkanaan

Bab III Rencana Kerja Perangkat Daerah
Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN BERKENAAN

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Kecamatan Kubutambahan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode

1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Kubutambahan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022 Kecamatan Kubutambahan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kubutambahan selama tahun berjalan 2022.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Kubutambahan 2022 Triwulan II telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perubahan Tahun 2022 ada dilaksanakan dan ada beberapa yang tidak dapat dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR /TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA- RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/K EUANGAN	OUT COME/OUT PUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	3,228,655,557.00	100	1,846,914,596.00	57.20	%	57.78	57.20	86.38
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	111,051,504.00	100	46,271,449.00	41.67	%	42.08	41.67	62.92
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran SKPD	111,051,504.00	5	46,271,449.00	4.00	Dokumen	4.42	4.00	6.42
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	2,137,196,315.00	100	1,402,634,265.00	65.63	%	66.29	65.63	99.10
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	2,016,972,811.00	12	1,334,321,910.00	12.00	Bulan	12.66	12.00	18.66
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	117,343,504.00	12	67,472,355.00	12.00	Laporan	12.57	12.00	18.57
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2,880,000.00	2	840,000.00	2.00	Laporan	2.29	2.00	3.29

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	380,026,212.00	100	119,292,655.00	31.39	%	31.70	31.39	47.40
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	5,612,320.00	10	2,146,000.00	8.00	Unit	8.38	8.00	12.38
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144,867,400.00	10	18,731,250.00	6.00	Unit	6.13	6.00	9.13
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pameran/Pawai/Informasi Pembangunan Jumlah Penganyar Jumlah Perayaan Hari-Hari Nasional Jumlah Sarana/Prasarana Upacara	172,399,492.00	1	78,176,905.00	1.00	Kali	1.45	1.00	1.95
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	11,089,500.00	6	3,255,000.00	4.00	Unit	4.29	4.00	6.29
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,117,500.00	4	2,353,000.00	6.00	Jenis	6.33	6.00	9.33
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	32,160,000.00	14	13,490,500.00	25.00	Jenis	25.42	25.00	37.92
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah /Dalam Daerah	6,780,000.00	20	1,140,000.00	22.00	Laporan	22.17	22.00	33.17
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	32,400,000.00	100	-	-	%	-	-	-
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional	-		-	-	%	-	-	-

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	474,644,026.00	100	238,349,146.00	50.22	%	50.72	50.22	75.83
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk/Keluar	253,999,876.00	10000	136,850,716.00	10,000.00	Exp	10,000.54	10,000.00	15,000.54
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Telepon dan Listrik	39,176,000.00	36	20,699,980.00	36.00	Rekening	36.53	36.00	54.53
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kendaraan	87,492,875.00	1	37,104,600.00	14.00	Unit	14.42	14.00	21.42
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	umlah Alat Kebersihan Jumlah Alat Tulis Kantor	93,975,275.00	181	43,693,850.00	200.00	Unit	200.46	200.00	300.46
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	125,737,500.00	100	21,858,500.00	17.38	%	17.56	17.38	26.25
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	84,710,000.00	16	21,858,500.00	18.00	Unit	18.26	18.00	27.26
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor/RT	41,027,500.00	35		-	Unit	-	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	103,720,984.00	100	67,261,810.00	64.85	%	65.50	64.85	97.92
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	103,720,984.00	100	67,261,810.00	64.85	%	65.50	64.85	97.92

7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pembinaan Kebersihandan Lingkungan Hidup Jumlah Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perizinan	103,720,984.00	13	67,261,810.00	13.00	Desa	13.65	13.00	20.15
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	164,926,642.00	100	78,496,155.00	47.59	%	48.07	47.59	71.87
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	164,926,642.00	100	78,496,155.00	47.59	%	48.07	47.59	71.87
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat	13,931,250.00	13	5,350,000.00	13.00	Desa	13.38	13.00	19.88
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Wilayah Kecamatan	150,995,392.00	13	73,146,155.00	48.44	Desa	48.93	48.44	73.15
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	212,395,938.00	100	93,608,770.00	44.07	%	44.51	44.07	66.55
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	164,926,642.00	100	2,173,000.00	1.32	%	1.33	1.32	1.99

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Linmas Desa/Kelurahan	12,120,800.00	13	2,173,000.00	13.00	Desa	13.18	13.00	19.68
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	200,275,138.00	100	91,435,770.00	45.66	%	46.11	45.66	68.94
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	200,275,138.00	13	91,435,770.00	13.00	Desa	13.46	13.00	19.96
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	343,343,310.00	100	144,109,401.00	41.97	%	42.39	41.97	63.38
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	343,343,310.00	100	144,109,401.00	41.97	%	42.39	41.97	63.38
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	156,182,242.00	13	58,746,615.00	13.00	Desa	13.38	13.00	19.88
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Pembinaan Tugas-Tugas Kepala Desa/Kelurahan	33,925,000.00	13	16,441,000.00	13.00	Desa	13.48	13.00	19.98

7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Pembinaan RKP Desa Prosentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan	120,085,468.00	13	61,757,186.00	13.00	Desa	13.51	13.00	20.01
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa Yang Dibina terkait Indikator Evaluasi	20,151,200.00	13	2,449,600.00	13.00	Desa	13.12	13.00	19.62
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Profil Kecamatan	12,999,400.00	1	4,715,000.00	1.00	Buku	1.36	1.00	1.86

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Realisasi dari program kerja tahun 2022 sampai dengan triwulan II tersebut memberikan bahan analisis terhadap beberapa program kerja yang sekiranya akan rendah realisasi pencapaian target dan anggarannya, jika dibiarkan walaupun pencapaian fisik 100% namun anggarannya tidak terserap seluruhnya. Atau kemungkinan adalah dengan anggaran yang sudah ada akan menghambat pencapaian target fisiknya. Berdasar itulah maka agar optimal dalam pencapaian target perlu diadakan penambahan anggaran dengan mengambil dari pagu anggaran program kerja lain yang sudah optimal target fisiknya. Selain itu juga mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program/kegiatan yang direncanakan, maka perlu adanya pengurangan atau perampingan anggaran. Rencana program, kegiatan dan sub.kegiatan dalam perubahan pada tahun anggaran 2022 ini meliputi:

A. Kegiatan lanjutan tahun berkenan, semua program dengan jumlah 5 program, 11 Kegiatan dan 28 Sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar 4.053.042.431 yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi keuangan SKPD, kegiatan Administrasi umum perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Komponen
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

Publik, Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda Perkada, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

B. Matrik rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, sebagai berikut di bawah ini :

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD

URUSAN		PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU	
SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI		RKPD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		UNSUR KEWILAYAHAN						
		KECAMATAN					3.980,742,349.00	4,053,042,431.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3,003,478,940.00	3,228,655,557.00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat					111,051,479	111,051,504
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Anggaran SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	111,051,479	111,051,504
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,081,564,479.00	2,137,196,315.00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyedia Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	1,952,563,000	2,016,972,811
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	126,101,479	117,343,504
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	2,900,000	2,880,000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah					270,626,300	380,026,21
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 unit	10 unit	3,593,800	3,593,800
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit	10 unit	44,977,000	144,867,400
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah pameran / pawai pembangunan JUmlah pengadaan sarana/prasarana upacara Jumlah penganyar Jumlah upacara / hari - hari nasional	1 kali 1 Penganyar 15 Kali 15 unit	1 kali 1 Penganyar 15 Kali 15 unit	133,167,980	172,399,492
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetak dan penggandaan	6 unit	6 unit	24,089,000	11,089,500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bacaan dan perundang - undangan	4 jenis	4 jenis	7,000,000	7,117,500
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman	14 Jenis	14 Jenis	42,630,000	32,160,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah	20 Laporan	20 Laporan	13,150,000	6,780,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					32,400,000	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional	1 Unit	1 Unit	32,400,000	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					430,526,682	474,644,026

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10000 exp	10000 exp	235,299,807	253,999,87
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Telepon Dan Listrik	36 Rekening	36 Rekening	34,176,000	39,176,000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kendaraan	1 unit	1 unit	80,000,000	87,492,875
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat tulis kantor Jumlah ruangan yang di bersihkan Jumlah tenaga kebersihan	181 Unit 30 Unit	181 Unit 30 Unit	81,050,875	93,975,275
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77,310,000	125,737,500
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	16 Unit 16 Unit	16 Unit 16 Unit	68,360,000	84,710,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	35 Unit	35 Unit	8,950,000	41,027,500

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					115,530,199	103,720,984
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					115,530,199	103,720,984
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Pembinaan Kebersihandan Lingkungan Hidup Jumlah Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perizinan	13 Desa 13 Desa	13 Desa 13 Desa	115,530,199	103,720,984
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					294,051,833	164,926,642
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					294,051,833	164,926,642
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah		Jumlah Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat	13 Desa	13 Desa	29,111,703	13,931,250
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Wilayah Kecamatan	13 Desa	13 Desa	264,940,130	150,995,392
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					209,798,997	212,395,938
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					3,575,000	12,120,800

		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Linmas Desa/Kelurahan	13 desa	13 desa	3,575,000	12,120,800
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				206,223,997	200,275,138
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	13 Desa	13 Desa	206,223,997	200,275,138
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				357,882,380	343,343,310
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				357,882,380	343,343,310
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	13 desa	13 desa	142,118,621	156,182,242
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Pembinaan Tugas-Tugas Kepala Desa/Kelurahan	13 desa	13 desa	33,592,000	33,925,000

		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah informasi rencana kerja pembangunan desa Jumlah musyawarah pembangunan desa dan kecamatan	13 Desa 75 %	13 Desa 75 %	117,993,559	120,085,468
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah kapasitas kader pemberdayaan dan kesehatan Jumlah pembinaan lomba desa / kelurahan	13 Desa	13 Desa	38,578,200	20,151,200
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah data profil kecamatan	1 Buku	1 Buku	25,600,000	12,999,400

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kubutambahan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kubutambahan Tahun 2017-2022 yang mengacu pada **VISI** Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA**” dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kubutambahan yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Kubutambahan. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Kubutambahan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan,

Disamping itu Renja Perubahan Kecamatan Kubutambahan juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Perubahan Kecamatan Kubutambahan ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Buleleng.

Kubutambahan, 23 Agustus 2022

Camat Kubutambahan,



Drs. Made Suyasa, M.Si

Nip. 19650207 199702 1 001

